

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam suatu pemerintahan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah membuat/menciptakan dan memberlakukan Undang–Undang yang gunanya untuk menciptakan sistem pengelolaan Anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Sejauh ini pemerintah sudah sering melakukan perubahan terhadap berbagai Perundang–undangan dan Produk Hukum yang berlaku tersebut agar terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap waktu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah juga telah melakukan perubahan mendasar terhadap Perundang–undangan dan Produk Hukum tersebut maksudnya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Hubungan Keuangan dan juga perubahan dalam pengelolaan Anggaran.

Penyusunan Anggaran Pemerintah juga dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah, Nomor

58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Dengan Undang–Undang dan Produk Hukum yang diberlakukan, pemerintah telah berusaha mengakomodasi dan menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam Undang–Undang dan Produk Hukum tersebut.

APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan–kegiatan pemerintah baik langsung dan tidak langsung. Proses penyusunan anggaran merupakan salah satu kegiatan yang erat kaitannya dengan anggaran itu sendiri baik itu dari APBD maupun APBN, karena apabila proses penyusunan anggaran sesuai dengan prinsip penyusunannya dan berdasarkan prestasi kerja pada instansi pemerintah maka penyusunan anggaran yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Padang mempunyai peran penting dalam pengalokasian dana anggaran pendidikan dan mengetahui perkembangan anggaran yang terjadi di setiap wilayah Kota Padang, maka perlu untuk kita ketahui perkembangan dan penggunaan anggaran belanja tersebut. Dalam hal ini di fokuskan pada proses penyusunan dan perkembangan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

Seluruh instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar mengeluarkan anggaran yang tepat dan efisien. Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengatur segala anggaran belanja yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Salah satu biaya yang harus direncanakan yaitu anggaran belanja. Belanja merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional pemerintah daerah. Anggaran belanja disusun dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap semua biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba membahas masalah yang tercakup dalam proses belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Dengan demikian, penulis akan membuat Laporan Magang yang berjudul **“PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan di bahas adalah:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang?
2. Bagaimana Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang?
3. Bagaimana perkembangan anggaran belanja di Dinas Pendidikan Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Mempelajari teori diperkuliahan belum lengkap tanpa mempraktekkan langsung di dunia kerja. Setiap Mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas diberi kesempatan mengaplikasi teori-teori yang telah dipelajari serta mensinkronisasi antara pendekatan akademis dengan praktik di dunia kerja.

Adapun tujuan-tujuan melakukan proses magang ini adalah :

1. Memberikan pengalaman kepada calon-calon lulusan yang diharapkan dapat membantu proses penyesuaian diri dengan lingkungan kerja.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Universitas Andalas.
3. Melatih keterampilan mahasiswa agar menjadi lulusan yang memiliki kemampuan khusus dibidang studi masing-masing.

4. Untuk lebih memahami langkah–langkah atau proses dalam penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Mengetahui hambatan–hambatan atau kendala–kendala dalam penyusunan anggaran belanja.

Pada umumnya para calon lulusan belum sepenuhnya siap untuk terjun ke masyarakat. Permasalahannya sangat sederhana, sebagian besar dari mereka menganggap ijazah sudah lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan dimasa mendatang. Sedangkan mempersiapkan skill yang merupakan faktor terpenting sering kali terabaikan.

1.4 Manfaat Magang

1. Berguna sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Mencoba untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Mengetahui secara detail bagaimana strategi dalam proses penyusunan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang.
4. Menemukan hal–hal baru terkait pelaksanaan pencatatan keuangan pada SKPD.
5. Sebagai persiapan untuk menghadapi lingkungan kerja.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Magang

Untuk mempermudah memahami laporan magang, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, perumusan masalah serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II KERANGKA TEORI

Menjelaskan tentang definisi anggaran secara umum, tujuan dan azas penyusunan anggaran belanja.

BAB III GAMBARAN UMUM

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Padang, visi dan misi serta struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran belanja dan perkembangan anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Padang.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan laporan magang dan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.